

# MEREFORMASI POLRI JUGA HARUS MEREFORMASI MASYARAKAT

Oleh : Anton Tabah  
(Pengamat Kamtibmas Kolumnis)



menyatakan : (1) TNI AD bertugas menegakkan kedaulatan negara di darat. (2). TNI AL menegakkan kedaulatan negara di laut. (3). TNI AU menegakkan kedaulatan negara di udara (4). Polri sebagai

**S**alah satu agenda politik menyongsong abad XXI menempatkan Polri secara proporsional pada posisi terdepan dalam binkamtibmas bukanlah sesuatu yang baru. De yure, telah lama diapresiasi dalam undang-undang. Seperti dalam Tap-tap MPR mulai Pelita I s/d VI mengemas aspirasi, Polri selaku kekautan inti kamtibmas yang mahir bersih dan berwibawa.

alat negara penegak hukum, meningkatkan tertib hukum, pengayom, pelindung pelayan dan pembimbing masyarakat demi terbinanya ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indoensia.

Jika diretas secara cermat, tugas matra Polri berkompeten langsung menangani masalah masyarakat. Sedang matra lain sebagai komponen pendukung jika matra Polri perlu bantuan. Para petinggi negara yang mengusulkan jika matra

UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankamneg pasal 30

Polri perlu bantuan. Para petinggi negara yang mengusulkan agar Polri didepan hanyalah pengasan (redifinisi) atas aspirasi rakyat dipertajam oleh perkembangan dunia menuntut seluruh negara menata kepolisiannya mengimbangi ancaman global.

### Polri Lebih Awal

Pemekaran polda dan Brimob se Indonesia yang dilakukan Kapolri awal 1997 adalah pertanda dimulainya reformasi di tubuh Polri. Ini berarti start reformasi Polri 2 tahun lebih awal dari reformasi nasional yang dimulai tanggal 21 Mei 1998. Tetapi dalam reformasi Polri haruskah Polri keluar dari ABRI? Atau dengan memberi otonomi secara tegas saja dan Polri tetap didalam ABRI?

Sebuah pengambilan keputusan sangat pelik sekalian mencari solusi paling tepat mengingat berbagai problema seius timbul ketika Polri ada dala mABRI. Contoh, political will hanya memandang tugas pokok Polri hanya merupakan sub bagian terkecil dari pembangunan Hankam, meminjam kata para pakar, Polri dianaktirikan. Padahal PBB sepakat, kamtibmas sebagai masalah penting dimasa damai maupun perang apalagi menghadapi

berbagai perubahan pancagatra sangat pesat membuat tantangan Polri amat berat dengan variable spektrum ancaman yang kompleks.

Teknologi informasi melahirkan globalisasi dan transparansi ideologi, politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya korelatif ancaman kamtibmas global maupun regional karena batas teritori antar negara hanya tinggal difinisi hukum. Suatu negara mencapuri atau tidak mencampuri negara lain, sulit dibedakan. Transparansi sosial ekonomi memunculkan issue perburuhan dan HAM yang tak diimbangi kesadaran kewajiban asasi (KAM). Tuntutan layanan hukum naik, namun kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terabaikan. Dengan demikian mereformasi masyarakat juga sangat penting karena mereformasi aparat tanpa mereformasi masyarakat (social reforms) hanya akan membuat aparat makin limbung. Bahkan pakar Kepolisian New York, E Adlow secara ekstrim menyatakan, janganlah terlalu mengharap polisi baik di tengah masyarakatnya yang kurangajar. Polisi hanyalah pantulan wajah masyarakatnya. ("Police and People" karya E. Adlow, New York, 1979).

## Spektrum Ancaman

Spektrum ancaman global terhadap kamtibmas semakin nyata, seperti kejahatan internasional dan berbagai kejahatan dimensi baru. Ancaman internal, luas geografis belum semua terjangkau pembangunan, demograsi pluralis multietnik kulturis, satu sama lain tak sama kemampuannya dalam memahami pembangunan. Pola GBHN dari Pelita ke Pelita selalu akomodatif terhadap budaya asing. Disisi lain mengharuskan bangsa Indonesia mempertahankan identitas budayanya. Dari sini variabel ancaman makin bertambah. Namun secara de facto gelagat ancaman kamtibmas dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori.

Pertama, ancaman kamtibmas oleh kesenjangan sosial ekonomi, Muncul jika pembangunan nasional yang digelar tak mampu memperkecil jurang ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Kedua, ancaman kekerasan oleh golongan tertentu, pemaksanaan kepentingan secara inkonstitusional. Muncul jika sistem politik tak berhasil menampung aspirasi masyarakat.

Ketiga, ancaman kamtibmas yang menjurus pola penggunaan kekuatan bersifat sparatisme. Muncul jika pemerataan pembangunan tak menjangkau seluruh wilayah nusantara secara seimbang.

Keempat, ancaman kamtibmas berskala tinggi berupa pemberontakan bersenjata oleh karena ingin mengubah ideologi negara dengan membentuk negara baru. Muncul jika pembangunan tak berhasil mengamalkan Pancasila, dan secara dini tak dicegah golongan ekstrim yang memaksakan kehendaknya.

## Garda Depan

Memahami spektrum bobot ancaman, secara politis penyelenggara negara bisa melangkah rasional mana yang harus diprioritaskan mengantisipasi perkembangan dan ancaman tersebut, untuk menemukan pola penanggulangan konsepsional mengacu terhadap berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

Agenda politik menampilkan Polri di garda depan cukup tepat karena "pemaksaan" mengedepankan fungsi lain dalam menangani masalah

kamtibmas akan merusak reputasi bangsa dimata dunia. Intervensi pada berbagai kasus kejahatan adalah contoh-contoh dekat yang terus dipertanyakan PBB.

Menghadapi kasus unjuk rasa atau kriminal massal, sebenarnya aparat sedang berseberangan dengan rakyat sendiri. Jatidiri Polisi teruji dalam menangani kasus-kasus semacam ini, sesuai idoktrin polisi menghadapi kekerasan dan konflik. Sistem senjata polisi bukan semata borgol dan bedil tetapi juga sistem senjata sosial dan hukum. Polisi bukan hanya mahir hukum tapi juga patuh hukum. Dari latar belakang doktrin sudah jelas, siapa bekerja apa dan bertanggungjawab pada siapa? Bagaimana cara bekerjanya? Ada sistem dan prosedur yang harus dipatuhi. Kesalahan prosedur akan berdampak luas, reputasi bangsa taruhannya.

#### Inventarisasi Masalah

Beberapa konsekwensi dari pernyataan politik harus dipikirkan Misalnya otonomi Polri dari operasional kepolisian, rekrutmen, pendanaan/ anggaran. Contoh, anggaran

penyidikan dalam angka sudah ada peningkatan sejak awal Pelita VI. Per kasus ringan dari Rp. 2500 kini Rp. 35.000, yang semula 150.000 menjadi Rp. 120.000, kasus berat dari 52.500 menjadi Rp. 420.000, namun biaya penyidikan dalam angka masih relatif karena biaya perkasus kejahatan sulit diprediksi secara matematis.

Perlu perhatian pula tentang peralatan konvensional seperti HT yang tidak memadai. Idealnya setiap anggota punya HT demi kecepatan di lapangan. Banyak informasi emergency dari komando sia-sia karena minimnya HT di lapangan. Misal, baru saja terjadi kasus perampokan diperkrakan pelakunya lari kearah luar kota dengan identitas kendaraan yang jelas. Tetapi karena kurangnya personil yang ber HT maka pelaku lolos dari pantauan dengan mudah. Boleh jadi paleku yang dicari malah sedang minum kopi bersama polisi yang lain karena polisi tersebut tak ber HT. Belum peralatan canggih kepolisian modern. Kalau semua ini tak diperhatikan, maka pengedepanan Polri malah akan semakin membuat limbung.

Secara matematis kita bisa bandingkan

pembangunan mata lain dengan mudah menambah kendaraan tempur pada hal per unitnya bermilyar rupiah, gampang menambah armada laut dan udara padahal bertrilyun rupiah. Tetapi Polri rasanya sulit sekadar menambah kendaraan patroli, HT dan peralatan kepolisian yang jauh lebih murah. Tahun ini saja tiga mata lainnya telah belanja peralatan secara besar-besaran bernilai trilyun rupiah masing-masing untuk TNI-AD puluhan tank Scorpion dan helikopter menyerbu MK-17 dari Rusia, TNI-AL belanja 43 kapal perang dari Jerman dan puluhan pesawat Nomad dari Australia, TNI-AU belanja puluhan pesawat Sukhoi-30 dari Rusia.

Lalu rakyat bertanya ingin tahu, Polri belanja apa? Jawabna, polri tak belanja apa-apa karena Polri tak punya apa-apa (Republika, 14 Agustus 1997) Belum lagi masalah kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka pengejaran tersangka maupun kerja sama dibidang teknis kepolisian. Nasib Polri memang mengenaskan bagai "anak tiri" padahal, tugas kepolisian dalam era globalisasi semakin rumit. Kalau Polri dianggap lemah karena apa? Akar kelemahannya diperbaiki bukan mengubah sistem. Seandainya jujur dalam pengedepanan

kepolisian mestinya Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tapi nyatanya hierarki Polri cukup jauh dari Presiden. Tepat tuntutan rakyat agar Polri keluar saja dari ABRI agar lebih otonom dan tangguh.

Era reformasi berarti juga mereformasi masyarakat. Rakyat jangan hanya pandai menuntut reformasi aparat tetapi rakyat juga harus berani mereformasi dirinya sendiri. Seperti, tidak disiplin, tak patuh hukum, pandai menuntut hak tapi lalai kewajiban, pandai mengoreksi pihak lain tapi tak pandai mengoreksi diri, lantang teriak reformasi tetapi malah merusak, menjarah, merampok, membakar memperkosa bahkan saling bunuh. Reformasi, mestinya juga mereformasi sikap, perilaku dan mental masyarakat bukan hanya aparat dan birokrasi. Jangan sampai, "Kuman diseberang laut tampak, sedang gajah di pelupuk matanya sendiri tak tampak."

*Anton Tabak, Kolumnis.*